

## PENGARUH KESADARAN POLITIK WARGA NEGARA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH STUDI DESKRITIF PADA MASYARAKAT KAMPUNG KLABEN KABUPATEN SORONG

Feny Yekwa Yudi Bisi<sup>1, 2</sup>, Roni Andri Pramita,<sup>3</sup> Jusmin, Hasna Biyau<sup>4</sup>

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, UNIMUDA Sorong

email, [roniandripramita@unimudasorong.ac.id](mailto:roniandripramita@unimudasorong.ac.id), [jusmin@unimudasorong.ac.id](mailto:jusmin@unimudasorong.ac.id), [vivohasna@gmail.com](mailto:vivohasna@gmail.com)

### Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2006 – 2008 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan angka golput (masyarakat yang tidak memilih) sebanyak 3,5% - 23,4% ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat semakin berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran politik warga negara terhadap tingkat partisipasi politik dalam sistem pemilihan umum kepala daerah studi deskriptif analitik pada masyarakat Kampung Klaben Distrik Mariat. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kampung Klaben Distrik Mariat. Jumlah populasi secara keseluruhan adalah 40 orang Masyarakat RT 01/RW 01 dan 22 orang RT 03/RW 01. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kesadaran politik warga terhadap tingkat partisipasi politik dalam sistem pemilihan umum kepala daerah masih sangat kurang.

**Kata kunci:** Studi Deskriptif Analitik Masyarakat terhadap kesadaran politik Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah

### Abstract:

*political awareness effect society to the participate level of political of the election common system leader analitic descriptive study to society of klaben village in district mariat, Research Paper, Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sorong. On common election leader territory since 2006 until 2008 election common of committee (KPU) made a note of the society which is not election is number 3,5%-23,4% it's prove that is most decrease. This research is goal to know what's political awareness effect society to participate level political of the common system of leader territory analitic descriptive study to the society in klaben of village district mariat. The form research which is done is descriptive study of research. it's used in klaben village of district mariat, according to amount of population of whole is 40 people from RT 01/ rw 01 and 22 people from RT 03/ RW 01. According to result of the research which is done, political society participate to the level participate political of election common of leader territory is very decrease. Keyword: descriptive study analitic society to political awareness to common election of Territory*

### A. Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu perwujudan dari keikutsertaan masyarakat dalam bagian dari negara yang mengatakan dirinya sebagai negara yang berdemokrasi. Hal ini juga merupakan perwujudan dari sila ke 4. Yang sistem demokrasinya berdasarkan pada demokrasi Pancasila dan di dasarkan pada kedaulatan rakyat.

Adapun perubahan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, tetapi

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dasar sesuai pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pemilihan Rakyat yang merupakan kedaulatan rakyat ialah rakyat ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum pada tingkat DPR, DPD dan DPRD serta dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Secara bertahap demokrasi bangsa Indonesia di uji kembali dengan momentum adanya pemilihan

umum Kepala Daerah yang dilakukan dengan cara langsung sejak tahun 2005. Walaupun tantangannya sebagian dari masyarakat masih sketis dengan adanya wacana pemilihan umum, hal ini dikarenakan dengan adanya ketidaksiapan dalam menyediakan materi dan infrastruktur dalam pemilihan umum.

Persiapan ini di anggap penting karena mengingat adanya catatan bahwa tidak adanya kesiapan yang maksimal dalam pelaksanaan pemilihan, sehingga masyarakat perlu adanya penguatan, partisipasi dan kemandirian rakyat yang di anggap sebagai persiapan dalam proses pemilihan rakyat.

Sedangkan secara faktanya, masyarakat mulai membiasakan diri hidup secara berdemokrasi pasca masa penyesuaian pemerintahan Soeharto, sehingga hal ini merupakan sebuah perwujudan dari adanya partisipasi masyarakat yang mengedepankan dalam kebebasan berpolitik.

Kebebasan yang di pahami oleh rakyat mengenai politik juga haruslah didasarkan pada upaya dalam penguatan menumbuhkan kesadaran berpolitik yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga momentum pemilihan umum di anggap sebagai momentum untuk menanamkan kesadaran politik dan melaksanakan pendidikan politik untuk masyarakat.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Murray Print (1999) Pendidikan kewarganegaraan juga merupakan bagian dari menumbuhkan kesadaran berpolitik masyarakat melalui pemilihan umum yang di ikuti oleh masyarakat secara langsung. (*civic education*).

Sebagai Sarana dalam mengaktualisasikan pelaksanaan *civic education* juga di ukur dari sejauh mana terlaksananya pendidikan politik di masyarakat

sehingga membutuhkan peran masyarakat dalam ikut serta dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Lembaga kekuasaan politik dipercaya oleh masyarakat dibentuk melalui kekuasaan politik yang dilakukan dalam proses pemilihan umum. Sehingga proses pemilihan umum merupakan sarana sebagai jembatan penghubung bagi lembaga kekuasaan politik dengan masyarakat. Sesuai dengan teori kekuasaan politik yang anut oleh Indonesia bahwa politik dan demokrasi tidak terlepas dari campur tangan rakyat, sehingga demokrasinya di kenal dengan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk Rakyat.

Partisipasi politik di anggap sebagai sejauh mana keterlibatan rakyat baik secara perorangan maupun kelompok dalam mengkaji, merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan politik.

Dari ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi rakyat bisa dipahami sebagai keterlibatan rakyat serta hubungan negara dan masyarakat (dalam bingkai *governance*). Namun dalam pengertian politik secara luas, partisipasi rakyat adalah semua bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses berhimpun untuk mempengaruhi ataupun melakukan perubahan keputusan yang stabil.

Sebagai tolak ukur dalam keterlibatan rakyat dalam pelaksanaan pemilu, rakyat memiliki peran dalam menentukan arah kemana kekuasaan politik ini akan dibentuk, sehingga untuk memenuhi itu perlu adanya analisis kebijakan dan kesadaran politik yang penuh masyarakat sendiri.

Berikut merupakan data hasil pemilihan Kepala daerah di daerah Kabupaten Sorong:

### **Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Daerah	Persentase Tidak Memilih
Distrik Aimas	13,292%
Distrik Makbon	0,472%
Distrik Mariat	5391%
Distrik Salawati	1901%
Distrik Mayamuk	1876%
Distrik Sorong	354%
Distrik Moisingin	0,494%
Distrik Salawati selatan	595%
Distrik Segun	362%
Distrik Moraid	5%
Distrik Klayili	231%
Distrik Seget	1743%
Distrik Sayosa	161%

Dari hasil atas di beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah menunjukkan beberapa pemicu rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah adalah sebagai berikut:

### B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Studi Deskriptif Analitik pada masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitik. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif

analitik memberikan gambaran, merinci, dan menganalisa data pada permasalahan yang terjadi pada saat ini, serta memusatkan pada pemecahan yang aktual. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Suharsimi Akrikunto (1998) bahwa” penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang”.

### C. Hasil Pembahasan

Masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan yang didasari sikap apatis, yakni mereka menyakini bahwa calon yang bertarung tidak memiliki kapasitas untuk mewujudkan harapan mereka. Selain itu mereka menyadari bahwa mencoblos dan tidak mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak memberi pengaruh.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah, di akibatkan persoalan teknis dalam pemilihan umum kepala daerah. Dalam hal ini, penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) yang kacau dapat memicu tingginya jumlah warga negara yang tidak terdaftar DPT, sehingga menggugurkan hak mereka sebagai pemilih.

Persoalan DPT selama pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah menjadi masalah krusial yang sepertinya tidak memiliki solusi. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa serangkaian pemilihan umum kepala daerah yang sudah berlangsung masalah DPT yang tidak akurat tetap menyisakan persoalan rendahnya partisipasi pemilih.

Partisipasi juga di pengaruhi oleh kepentingan individual pemilih. Dalam hal ini; banyak pemilih yang lebih mendahulukan dan memprioritaskan kebutuhan individualnya, seperti pergi ke sawah, masuk kerja bagi buruh pabrik, kebun atau tidak mudik bagi yang merantau daripada pergi ke TPS untuk mencoblos.

Oleh karena itu, rakyat hendaknya diberikan kemerdekaan untuk menentukan pilihannya. Rakyat harus mampu menentukan hak-hak politiknya secara sadar dan bertanggung jawab. Sebagai proses yang baru dan meniscayakan kehidupan demokratis yang lebih beradab, maka pemilihan umum kepala daerah harus mampu dipahami sebagai suatu proses yang penuh dengan dinamika. Selain itu, kesiapan teknis yang selama ini menjadi domain pemerintah dan KPUD pada persoalan pendataan pemilih harus segera ditingkatkan supaya hak warga negara dalam memilih tidak hilang secara percuma.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” Pengaruh Kesadaran Politik Warga Negara Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Deskriptif Analitik Pada Masyarakat Kampung Klaben Distrik Mariat kabupaten sorong)”

Hak menurut Prof. Dr. Notonagoro adalah kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan semata-mata oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Agar penelitian yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, maka sebelum melaksanakan terlebih dahulu dilakukan persiapan-persiapan yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian. Yang dilakukan sebelum melaksanakan penelitian adalah menetapkan langkah-langkah penelitian yang meliputi memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, memilih pendekatan, menentukan variabel, menentukan dan menyusun instrumen, mengumpulkan data, menganalisa data menarik kesimpulan, dan menulis laporan.

Kegiatan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mendatangi masyarakat RT 01/RW 01 dan masyarakat RT 03/RW 01 untuk mencetak dan memastikan kesiapan mereka untuk menerima penelitian yang dilakukan.
- b. menyebarkan instrumen penelitian, berupa angket skala likert kepada responden yang telah ditetapkan yaitu masyarakat RT 01/RW 01 dan masyarakat RT 03/RW 01.
- c. pengumpulan kembali angket tersebut dilakukan secara kolektif kemudian diserahkan kepada penulis

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran politik warga negara terhadap tingkat partisipasi dalam sistem pemilihan umum kepala daerah studi deskriptif analitik pada masyarakat kampung Klaben Distrik Mariat. Penelitian ini menggunakan dua RT

yaitu RT 01/RW 03 Deskriptif hasil angket dan observasi

Masyarakat	Golput	Faktor Hubungan keluarga	Faktor Politik uang
RT 01/RW 01	80%	10%	10%
RT 03/ RW 01	27%	18%	55%
Total	100%	20%	80%

Berdasarkan table 4.2 terlihat bahwa dari 62 orang yang dijadikan subyek penelitian, 40 orang RT 01/RW 01 yang tidak memilih 80% atau 32 orang, yang memilih berdasarkan politik uang dan kesadaran politik sendiri sebesar 10% atau 4 orang. Sedangkan RT 03/ RW 01 yang menjadi subyek sebanyak 22 orang yang tidak memilih sebanyak 27% atau sebanyak 6 orang dan yang memilih karena kesadaran politik sebanyak 17% atau 4 orang. dan RT 03/RW 01.

### Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon masyarakat Kampung Klaben Distrik Mariat dalam mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap politik masih sangat kurang.

2. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran partisipasi politik masyarakat Kampung Klaben Distrik Mariat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 2016, diantaranya adalah faktor hubungan masyarakat dengan calon, faktor politik uang.

### Saran-saran

Adapun saran yang penyusun tawarkan setelah menemukan hasil kesimpulan dari skripsi ini sebaiknya pemerintah Distrik Mariat memberikan sosialisasi pengetahuan politik kepada seluruh masyarakat Kampung Klaben tentang pemilu.

### RUJUKAN

- Abdul Hakim Garuda Nusantara. 1985. Politik Hukum Nasional. (Makalah Karya Latihan Hukum). Surabaya:YLBHI.
- Achmad Ssnusi. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung:Trasito.
- Anonim.Undang-undang No.12 tahun 2006. Tentang'' Kewarganegaraan Republik Indonesia''. Diakes www. Go.id. pada tanggal 23 Januari 2015.

Arifin Rahman, (1998) “ *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif dan Fungsional*”. Surabaya:SIC.

Deden Faturahman dan Wawan Subari, “ *Pengantar Ilmu Politik*”, Malang, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2002

Bintang Saragih.1987. *Lembaga Perwakilan dan Pemilu Indonesia*.Jakarta: Gaya Media Pramana.

Greene Thomas H., Ph.D.,Dkk. 1984. “*Lembaga-lembaga Politik*”. Jakarta: IND-HILL Co.

STKIP Muhammadiyah Sorong.2016. *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Akademik 2015/2016*. Sorong: Surya Pres

Umar Said Sugiarto, S.H.,M.S. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia Sinar Grafika Jakarta: Lembaga Informasi Nasional*